

KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA: KASUS PULAU KAPOTA, WAKATOBI, SULAWESI TENGGARA

Intan Permata Sari
Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
intanpermatasari1112@gmail.com

Abstrac: *Conflicts of Interest in Tourism Development: Kapota Island Case, Wakatobi, Southeast Sulawesi.* The tourism sector is a new magnet whose charm can not be denied. This is because human needs have begun to grow, not just the primary needs such as clothing, food, and boards, but the emergence of new needs of recreation. The emergence of new needs in the form of recreation to make the perpetrators of tourism are competing to develop the region into one of tourism destinations. One area that is doing tourism development is Kapota Island. The island is located in Kapota District, Wakatobi Regency, Southeast Sulawesi. The management of tourism in Kapota was originally undertaken by Wakatobi National Park because Kapota Island is one of the 'conservation areas' located under Wakatobi National Park. However, there is an overlap of policy because the tourism sector is the domain of Tourism Department of Wakatobi Regency. The conflict between Wakatobi National Park and the Department of Tourism turned out to involve local community leaders, who turned out to be the same people. This public figure stands in two interests with two different community institutions.

Keywords : Island of the capital; Wakatobi; Tourism Development; Conflict; Wakatobi National Park; Tourism Office of Wakatobi Regency; Public figure.

Abstrak: *Konflik Kepentingan dalam Pengembangan Pariwisata: Kasus Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara.* Sektor pariwisata merupakan magnet baru yang pesonanya tidak dapat ditolak. Ini dikarenakan kebutuhan manusia sudah mulai bertambah, tidak hanya kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan saja tetapi muncul kebutuhan baru yaitu rekreasi. Munculnya kebutuhan baru berupa rekreasi membuat para pelaku pariwisata berlomba-lomba untuk mengembangkan daerahnya menjadi salah satu destinasi pariwisata. Salah satu daerah yang sedang melakukan pengembangan pariwisata adalah Pulau Kapota. Pulau ini terletak di Kecamatan Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pengelolaan pariwisata di Kapota pada awalnya dilakukan oleh Taman Nasional Wakatobi karena Pulau Kapota merupakan salah satu 'wilayah konservasi' yang berada di bawah Taman Nasional Wakatobi. Akan tetapi terdapat tumpang tindih kebijakan karena sektor pariwisata merupakan ranah Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Konflik antara Taman nasional Wakatobi dengan Dinas Pariwisata ternyata melibatkan tokoh masyarakat setempat, yang ternyata adalah orang yang sama. Tokoh masyarakat ini berdiri di dua kepentingan dengan dua lembaga masyarakat yang berbeda.

Kata Kunci: Pembangunan Pulau, Wakatobi, Pengembangan Wisata, Konflik, Taman Nasional Wakatobi.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya, baik dalam bidang sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), kebudayaan, dan juga alamnya yang sangat indah. Sayangnya, potensi kekayaan yang dimiliki negara kita kurang dipahami dengan baik sehingga

usaha pengembangannya atau eksplorasi kekayaan ini tidak dilakukan secara maksimal. Hanya segelintir pihak yang menyadari bahwa kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan, baik keuntungan individual, kelompok, sebagian masyarakat, bahkan untuk keuntungan negara.

Kita tidak perlu meragukan bahwa kekayaan yang dimiliki Indonesia mampu menarik investor asing untuk menanamkan modalnya, seperti di Papua dan Bali. Tanah Papua mengandung begitu banyak hasil bumi, mulai dari emas, tembaga, minyak bumi, dan sebagainya. Begitu pula Bali, daerah ini memiliki pesona yang luar biasa di bidang kebudayaan. Kemampuan masyarakat Bali untuk mempertahankan adat dan kebudayaannya menjadikannya memiliki nilai eksotis tersendiri. Bahkan, banyak turis yang lebih mengenal Bali daripada Indonesia.

Daya tarik yang dimiliki Indonesia tentu memiliki harga jual yang sangat mahal sehingga menarik sejumlah pihak yang berkepentingan atau yang memiliki kuasa atas wilayah tersebut untuk mengklaim bahwa sektor tersebut berada di bawah kekuasaan mereka. Pada tahapan inilah kemudian kepentingan berbagai pihak mulai berbenturan, mulai dari kepentingan pemerintah daerah, pemilik lahan, investor, tokoh masyarakat yang berpengaruh, sampai pada masyarakat lokal itu sendiri. Kepentingan ini mulai tarik menarik sampai memunculkan konflik lokal di daerah tersebut.

Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Wakatobi merupakan salah satu Kabupaten yang baru berkembang yang terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara. Wakatobi sangat terkenal dengan wisata bawah laut yang sungguh mempesona, dianggap sebagai salah satu wisata bawah laut terbaik di dunia. Tak heran bila banyak sekali turis mancanegara yang datang berkunjung,

baik untuk berwisata menikmati keindahan bawah laut maupun melakukan observasi sebagai bahan riset mereka.

Salah satu daerah wisata yang sedang dikembangkan oleh Wakatobi adalah Pulau Kapota. Pulau ini terletak di kecamatan Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Untuk bisa sampai ke Kapota, kita harus menempuh jalur laut. Kapota adalah salah satu potensi destinasi pariwisata di Wakatobi. Pulau ini masih asri karena memang belum banyak wisatawan yang berkunjung ke Pulau Kapota. Jangankan untuk berkunjung, ketika kita melihat peta Kabupaten Wakatobi, kita tidak bisa menemukan Pulau Kapota karena memang tidak dituliskan namanya di sana.

Untuk itu, beberapa pihak berkeinginan untuk mengembangkan Pulau Kapota sebagai salah satu destinasi wisatawan. Pihak-pihak tersebut adalah Dinas Pariwisata dan Taman Nasional. Ide mengenai desa wisata pertama kali dicetuskan oleh Taman Nasional melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetapi tidak berjalan lancar kemudian dilanjutkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi melalui Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Kedua lembaga negara ini saling bersaing dalam memperebutkan penguasaan sektor pariwisata di Pulau Kapota. Akan tetapi yang menarik adalah kedua instansi ini 'memanfaatkan' orang yang sama untuk menjalankan misi mereka untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kapota. Kesempatan yang baik ini dimanfaatkan oleh tokoh tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi sehingga beliau menjadi 'pintu masuk'

pariwisata di Kapota. Dengan posisinya tersebut, beliau berada di posisi pusat mengalahkan posisi kedua instansi ini.

Tulisan ini akan menjelaskan mengenai tiga tingkatan kepentingan, yaitu : 1) mikro (tingkat lokal); 2) meso (tingkat daerah); 3) makro (tingkat nasional). Ketiga tingkatan ini menyebabkan adanya tumpang tindih kebijakan dalam pengembangan pariwisata di Pulau Kapota. Ketiga kelompok ini memiliki tiga aktor yang bermain, yaitu tokoh masyarakat yang menjadi pusat pergerakan pengembangan pariwisata di Pulau Kapota, Dinas Pariwisata sebagai dinas yang bertanggung jawab pada pengembangan pariwisata di Wakatobi, dan Taman Nasional sebagai 'penguasa pertama' wilayah Wakatobi. Tiga kelompok ini sibuk memposisikan diri mereka menjadi bagian yang paling penting dalam proses pengembangan pariwisata tetapi melupakan esensi pengembangan pariwisata itu sendiri sebagai usaha untuk mensejahterakan rakyat.

a. Landasan Pemikiran

Pariwisata merupakan industri yang ramah lingkungan dan bersih, tidak seperti sektor pembangunan seperti manufaktur, pertambangan, dan kehutanan. Pariwisata terlihat memiliki potensi untuk menjadi kekuatan pendorong utama untuk pengembangan ekonomi karena efek multiplier yang besar dan potensi peningkatan ekonomi dan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja tidak terampil dan setengah terampil. Dengan alasan tersebut sumber daya alam dan budaya yang terbatas dieksploitasi dan pariwisata menjadi sebuah sektor

yang penting untuk diversifikasi ekonomi.¹

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor pariwisata sekarang ini menjadi primadona baru dalam masyarakat. Banyak orang berlomba-lomba untuk berekreasi, ini dibuktikan dengan selalu penuhnya tempat pariwisata di setiap akhir pekan. Rekreasi menjadi kebutuhan baru dalam masyarakat global saat ini. Kebutuhan akan destinasi baru membuat beberapa pihak sadar bahwa potensi pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten Wakatobi belum diperkenalkan secara maksimal seperti yang dilakukan oleh Raja Ampat. Padahal, keindahan wisata bawah laut yang dimiliki oleh Wakatobi tidak kalah jika dibandingkan dengan Raja Ampat.

Salah satu potensi pariwisata yang mulai dikembangkan adalah Pulau Kapota. Pulau ini akan dijadikan salah satu tempat pariwisata dengan berbasis pada alam (ekowisata).² Menurut Direktorat Jendral Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 2009, ada lima kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat, yaitu: 1) pengelolaan ekowisata dilakukan oleh penduduk setempat; 2) *Local Ownership*; 3) sarana akomodasi disediakan penduduk setempat; 4) pemandu adalah penduduk setempat; 5) perintisan, pengelolaan, dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab masyarakat setempat.³

Untuk itu perlu koordinasi dari beberapa pihak yang terkait agar proses pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kapota bisa berjalan dengan lancar. Pihak-pihak tersebut adalah Taman Nasional Wakatobi, Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi serta

kelembagaan adat setempat.⁴ Sayangnya, koordinasi yang diharapkan tidak berjalan dengan baik karena beberapa pihak menginginkan pengembangan pariwisata sesuai dengan versi mereka masing-masing.

b. Metodologi Penelitian

Pesona sektor pariwisata yang sedang naik daun di Indonesia, membuat banyak wilayah menjadi 'latah' sehingga berlomba-lomba untuk melakukan pengembangan pariwisata dan melakukan *branding* terhadap produk pariwisata yang 'laku' dijual di pasaran. Untuk itu, ada banyak pihak yang mau tidak mau harus dilibatkan dalam proses 'menjual' keindahan pariwisata yang dimiliki oleh suatu daerah, seperti pihak pemerintah daerah, investor, tokoh adat, dan masyarakat lokal.

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Pulau Kapota selain menjadi daerah tujuan wisata yang dikembangkan oleh pemerintah, juga sebagai daerah yang memiliki sumber daya wisata yang kaya. Daerah ini menjadi fokus perhatian dan juga pusat pengaruh yang melibatkan banyak pihak dalam pengembangan pariwisata.

Penelitian ini dilakukan pada Juni-Agustus 2013 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang terlibat dalam perebutan hak pengelolaan pariwisata yang ada di Kapota. Selain pegawai Taman Nasional dan Staf Dinas Pariwisata diwawancarai juga tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di daerah. Pengamatan terlibat dilakukan atas setiap

kegiatan terkait, termasuk rapat-rapat terkait pariwisata yang diadakan oleh berbagai pihak, khususnya di Pulau Kapota.

Pembahasan

Pulau Kapota merupakan salah satu pulau yang letaknya sangat strategis di wilayah Wakatobi. Wilayah yang terletak di wilayah kecamatan Kapota⁵ ini berada sangat dekat dengan Ibukota Kabupaten Wakatobi, yaitu Wangi-Wangi. Pulau ini bisa dijangkau dengan menggunakan transportasi tradisional yang dikenal dengan nama *jonson*. Perjalanan menggunakan *jonson* bisa ditempuh dalam waktu 15-20 menit dan *jonson* mulai bergerak pukul 6 pagi sampai 4 sore. Oleh karena itu, akses dari Kapota ke Wangi-Wangi sangat terbuka. Hal ini dibuktikan dari jumlah penumpang *jonson* yang tidak pernah kurang dari 10 orang setiap kali berangkat dan sangat ramai pada jam-jam tertentu, biasanya jam 6-8 pagi, jam 12-2 siang, dan juga jam 4 sore. Akses yang cukup lancar ini ternyata hanya berlaku bagi orang Kapota yang memang kegiatannya terpusat di Wanci, ibu kota kabupaten Wakatobi di pulau Wangi-wangi. Hampir setiap hari orang pulau Kapota ke Wanci untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau suatu urusan di pemerintahan.

Hal ini tidak berlaku sebaliknya, tidak banyak orang Wangi-Wangi yang datang ke Kapota karena memang tidak ada kegiatan yang dilakukan. Di pulau Kapota, mungkin hampir sama dengan kehidupan masyarakat pulau kecil lainnya, fasilitas yang dimiliki sangat minim. Tidak ada kendaraan roda empat karena memang tidak memungkinkan

membawa kendaraan roda empat ke pulau ini. Hanya ada kendaraan bermotor yang hampir dimiliki oleh setiap rumah. Ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk membawa mobil menggunakan *jonson* dan juga jalan yang ada di Kapota masih sempit dan hanya beralaskan semen. Tidak ada pasar yang menjadi tempat perputaran ekonomi, hanya ada beberapa warung kecil yang menjadi penyangga kebutuhan masyarakat sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat Kapota harus bolak-balik ke Wanci untuk berbelanja.

Kapota sebagai bagian dari wilayah Wakatobi sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan. Wakatobi di dunia Internasional terkenal sebagai surga bawah laut. Ini dikarenakan wilayah Wakatobi yang 97% wilayahnya adalah laut dan memiliki 90% spesies bawah laut dari seluruh dunia.⁶ Akan tetapi kesempatan untuk memanfaatkan nama besar Wakatobi ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik oleh penduduk Kapota. Bahkan dikalangan anak-anak saja, sebagai generasi penerus para orang tua, anak-anak tidak mengetahui bahwa Wakatobi adalah singkatan dari empat pulau besar⁷ dan tidak pernah memahami letak pulau mereka yang sangat strategis. Untuk itu, pemahaman akan posisi pulau mereka memang harus diperkenalkan sejak dini kepada anak-anak supaya mereka tahu bersikap dan memanfaatkan potensi pariwisata yang didapatkan dari letak pulau mereka yang strategis. Pemahaman mengenai pariwisata juga menjadi langkah penting agar dapat siap untuk menjadi wilayah tujuan pariwisata

para wisatawan baik lokal maupun internasional.

Di kalangan masyarakat Kapota, potensi wisata yang mereka miliki masih belum disadari. Mayoritas dari mereka belum mengetahui potensi wisata yang dimiliki oleh pulau mereka. Mereka hanya mengunjungi tempat-tempat wisata populer seperti pantai dan juga danau, sedangkan untuk potensi wisata yang lain hanya diketahui oleh pelaku-pelaku wisata saja. Akan tetapi jangan membayangkan danau dan pantai yang ada sudah layak bagi pengunjung karena fasilitas yang dimiliki sangat minim, untuk danau misalnya, hanya ada dua gazebo.⁸ Belum lagi akses jalan yang sulit. Hanya ada jalan setapak yang dipisahkan menjadi dua jalan bagi kebutuhan jalan sepeda motor dan sepanjang jalan dipenuhi oleh ilalang dan semak belukar yang tidak terawat. Kondisi ini tidak sepadan mengingat danau adalah pariwisata andalan masyarakat Kapota. Masyarakat masih bersikap acuh tak acuh tentang pengembangan pariwisata danau.

Rapat antara tokoh adat Kapota dengan pihak Dinas Pariwisata pernah dilakukan pada tahun 2013 untuk menyerahkan hak adat atas danau kepada Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan danau agar bisa dimaksimalkan. Sempat ada protes dari beberapa tokoh adat atas 'pemberian' hak danau dari adat kepada pihak Dinas Pariwisata karena mereka menganggap bahwa danau adalah milik mereka dan ada ketakutan ketika Dinas Pariwisata memberikan pengelolaan danau kepada pihak asing sehingga masyarakat lokal akan 'terasing' di wilayahnya sendiri seperti kasus yang ada di Hoga.⁹ Akan

tetapi Dinas Pariwisata, aparat desa, dan beberapa tokoh adat yang setuju dengan pengembangan danau, yang menegaskan bahwa setelah danau dikembangkan oleh pihak Dinas Pariwisata maka pengelolaannya akan diberikan sepenuhnya kepada masyarakat Kapota. Berdebatan itu berakhir pada penandatanganan pemberian hak adat danau kepada Dinas Pariwisata yang ditandatangani oleh *miantu'u*¹⁰, ketua Dinas Pariwisata, tokoh agama, dan perangkat desa sebagai saksi.

Selain danau, tempat wisata favorit lainnya adalah pantai. Di Kapota ada banyak pantai yang dilihat dari potensinya tidak berbeda jauh. Pantai yang mereka miliki cukup bagus dengan pasir putih dan juga air pantai yang sangat jernih. Akan tetapi potensi pariwisata yang menarik seperti ini belum juga disadari oleh masyarakat. Mereka menganggap bahwa pantai adalah 'tempat sampah' yang sangat besar. Paradigma berpikir seperti ini membuat pantai adalah tempat pembuangan terakhir bagi sampah rumah tangga dan juga sampah kelapa. Sangat disayangkan memang, tetapi ketika kita meminta mereka untuk menjaga pantai mereka demi kepariwisataan, mereka menolak karena mereka tidak pernah merasakan dampak pariwisata secara langsung. Bahwa sempat ada ucapan, "*Siapa sih yang mau datang ke Kapota? Gak ada turis ke sini.*" Sebenarnya *celetukan* salah satu warga ini memang tidak salah walaupun terdengar berlebihan. Memang masih sangat jarang ada turis yang datang ke Kapota, yang biasanya datang hanyalah orang-orang dari dinas, lembaga penelitian atau dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mereka datang ke Kapota dalam rangka dinas atau melakukan penelitian mengenai Kapota, bukan untuk wisata. Menurut data yang didapat dari lembaga SPKP, turis yang benar-benar datang ke Kapota setiap tahunnya kurang lebih berjumlah 40-50 orang/ tahun atau sebesar 40% dari total pengunjung dan terus berkurang setiap tahunnya.

Kegagalan pariwisata di Kapota tidak hanya dikarenakan oleh dunia pariwisata yang masih dianggap baru dan tidak dekat dengan masyarakat Kapota, tetapi juga karena mereka 'menyepelkan' potensi pariwisata yang mereka miliki. Mereka tidak begitu percaya dengan proses pengembangan pariwisata di wilayah Kapota. Ini dikarenakan belum banyak wisatawan yang datang ke Kapota dan ada atau tidak adanya wisatawan tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Masyarakat cenderung pesimis dengan pengembangan Kapota karena mereka menganggap tidak ada yang peduli dengan 'kampung' mereka. Rasa pesimis inilah yang mendorong rasa 'cuek' mereka akan kepariwisataan.

Pengembangan pariwisata di wilayah Kapota memang masih lemah. Pariwisata belum menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat Kapota dan mereka tidak dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung karena mereka tidak memiliki akses pengetahuan mengenai kepariwisataan dan cara menjual potensi wisata mereka ke publik. Oleh karena itu, pariwisata yang biasanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakatnya, tidak dirasakan oleh masyarakat Kapota. Di tempat-tempat wisata yang seringkali dikunjungi orang saja tidak ada yang berjualan di sana.

Bahkan di wilayah Kapota sendiri, sulit sekali menemukan tempat makan atau tempat membeli 'jajan' kecuali di warung. Padahal transaksi ekonomi yang mereka lakukan akan membuat perputaran uang di Kapota menjadi lancar.

a. Konflik Kepentingan: Politik Lokal dan Supralokal

Pulau Kapota sebenarnya pulau yang sangat menarik. Pulau ini diam-diam sudah dilirik oleh beberapa instansi pemerintah seperti Taman Nasional, yang sudah sejak dahulu menjadikan wilayah ini sebagai daerah konservasi, dan juga Dinas Pariwisata yang pelan-pelan mulai mengagumi potensi yang dimiliki pulau ini. Potensi wisata yang saling dipahami oleh kedua instansi ini, membuat mereka berlomba-lomba membuat desa wisata yang diwakilkan dengan hadirnya organisasi-organisasi lokal di Kapota yang mengelola pariwisata mereka.

Dimulai dari Taman Nasional yang merupakan penguasa pertama wilayah Wakatobi sebelum dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri. Taman Nasional memposisikan diri mereka adalah pihak yang berhak atas wilayah konservasi mereka, yang termasuk salah satu di dalamnya adalah Pulau Kapota. Rasa memiliki ini menyebabkan semua aktivitas wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka harus diketahui dan diizinkan oleh Taman Nasional. Wilayah kerja Taman Nasional yang pada mulanya hanya bidang konservasi, lambat laun bergeser memasuki wilayah pariwisata. Taman Nasional menginginkan Pulau Kapota menjadi salah satu desa wisata di Wakatobi karena melihat potensi wisatawan yang begitu tinggi. Pada

akhirnya Taman Nasional membentuk suatu organisasi lokal yang bernama SPKP Banakawa¹¹. Akan tetapi, pembentukan SPKP tidak berjalan mulus. Taman Nasional seperti melupakan kewajibannya untuk memperhatikan desa wisata yang mereka buat sehingga tidak begitu memperhatikan perkembangan organisasi ini. Pembentukan SPKP dianggap tidak produktif dan Taman Nasional 'tidak sungguh-sungguh' membantu mereka dalam mengembangkan Pulau Kapota.

Setelah dibentuknya Dinas Pariwisata Wakatobi, instansi ini memiliki tugas untuk mengembangkan dan mengelola aset pariwisata yang ada di wilayah Wakatobi, termasuk Pulau Kapota. Bermula pada ketidakberhasilan Taman Nasional untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Pulau Kapota, Dinas Pariwisata mulai mendekati seorang tokoh masyarakat, yang merupakan tokoh perwakilan Taman Nasional untuk masyarakat Kapota (ketua SPKP), dengan mengumbar janji akan menjadikan Pulau Kapota sebagai salah satu destinasi pariwisata di Wakatobi. Pada akhirnya tokoh tersebut, sebagai wakil dari adat dan masyarakat setuju dan memberikan ruang bagi Dinas Pariwisata untuk bergabung mengembangkan pariwisata di Pulau Kapota. Dengan 'izin' seperti itu, Dinas Pariwisata mulai mengembangkan 'kekuasaannya' melalui organisasi bernama LKM (Lembaga Kelompok Masyarakat) Baruga. Tawaran Dinas Pariwisata untuk mulai bergabung dan membantu mengembangkan pulau Kapota tidak bisa ditolak. Janji untuk menjadikan Pulau Kapota lebih baik memang menjadi daya tarik yang luar biasa.

Akan tetapi, Taman Nasional tidak tinggal diam, mereka memposisikan diri sebagai penguasa wilayah karena Kapota merupakan wilayah konservasinya yang sudah ada sebelum adanya pemerintahan Wakatobi. Konflik antara Taman Nasional dan Dinas Pariwisata sangat terasa karena mereka membuat kebijakan yang tumpang tindih. Misalnya saat menentukan paket pariwisata, mereka berjalan sendiri-sendiri, tergantung wisatawan mendapatkan paket pariwisata dari pihak yang mana. Akan tetapi, melihat nuansa persaingan dengan Dinas Pariwisata di dalam Pulau ini, membuat Taman Nasional membuat keputusan untuk melakukan *join program* dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pembangunan Umum, Dinas Pariwisata, dan lain sebagainya untuk tetap *eksis* di dalam masyarakat.

Taman Nasional menggunakan SPKP untuk menjadi 'pengantar' kepentingannya dalam memperebutkan penguasaan pariwisata di Kapota. Begitu juga dengan Dinas Pariwisata, mereka menggunakan 'jasa' LKM untuk menjalankan program-program pariwisata yang sudah mereka bentuk. Akan tetapi, sebenarnya kedua organisasi lokal ini berada di bawah satu pengaruh yang sama, yaitu tokoh masyarakat yang menjadi representasi Kapota. Meskipun tokoh representasi Kapota ini bukanlah ketua LKM tetapi ketua LKM ini berkoordinasi kepada tokoh tersebut dalam menjalankan program organisasi mereka.

Pengelolaan pariwisata di Pulau Kapota bisa kita lihat dari tiga tingkatan, yang pertama adalah tingkatan lokal (mikro), tingkatan daerah (meso) dan

tingkatan nasional (makro). Ketiga tingkatan ini menghadirkan aktor yang berbeda.

Pada tingkatan mikro, tokoh yang hadir seharusnya adalah ketua adat dan kepala desa. Akan tetapi ada misrepresentasi otoritas yang terjadi. Ketua adat dan kepala desa yang ada di Kapota jarang sekali dilibatkan. Mereka hanya dilibatkan ketika ada pihak-pihak dari Dinas Pariwisata atau Taman Nasional yang datang untuk membuat 'kontrak kerja' dengan mereka. Tingkatan kedua adalah tingkatan yang berada pada tataran meso. Pada tingkatan ini yang bermain adalah pemerintahan Wakatobi yang diwakilkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Pada tingkatan ketiga berada pada tingkatan makro yang sudah melibatkan kepentingan nasional. Aktor yang bermain adalah Taman Nasional.

Konflik kepentingan seperti inilah yang membuat sistem politik di Kapota mulai terasa panas dan sensitif. Sistem kekuasaan yang tidak bisa dikontrol ini menyebabkan banyaknya kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih di wilayah Kapota, khususnya pada bidang pariwisata. Misalnya saja Taman Nasional yang membuat sebuah organisasi bernama SPKP Banakawa yang pada awalnya menangani permasalahan konservasi lalu mulai merembet ke permasalahan desa wisata. Kebijakan Taman Nasional ini sebenarnya menyalahi aturan mengingat masalah pariwisata adalah permasalahan yang ditangani oleh Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata juga tidak mau ketinggalan, mereka membuat sebuah lembaga masyarakat yang bernama LKM Baruga yang terkonsentrasi pada masalah

pariwisata termasuk mempersiapkan *tour guide* di Pulau Kapota dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai kepariwisataan kepada anak-anak muda perwakilan desa.

Kesimpulan

Jika kita lihat lebih jauh, konflik kepentingan yang terjadi di Kapota tidak melibatkan *miantuu*, dan juga kepala desa di Pulau Kapota. Ketidakhadiran ketua adat dan kepala desa bisa disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Pertama karena tokoh yang merepresentasikan Kapota adalah salah satu tokoh adat dan juga bagian dari struktur desa. Beliau adalah anak dari salah satu orang yang berpengaruh pada pembentukan desa (cikal bakal desa), bapaknya juga tokoh adat yang berpengaruh. Oleh sebab itu, 'kekuasaan' dan 'kekuatan' yang dimiliki oleh tokoh representasi lokal dipengaruhi oleh 'kekuasaan masa lalu', seperti yang dikatakan Fox bahwa keturunan sangat menentukan kekuasaan. Ketua adat dan kepala desa merasa sungkan untuk menegur dan ikut campur dalam urusan yang di bawahi oleh tokoh tersebut.

Kemungkinan kedua adalah Taman Nasional dan Dinas Pariwisata memang menghindari kehadiran ketua adat dan kepala desa. Oleh sebab itu, mereka menggunakan masyarakat Kapota sendiri untuk menjadi bagian dari kepentingan mereka (melalui organisasi yang mereka bentuk) agar jika terjadi sesuatu hal buruk, maka yang berhadapan adalah sesama masyarakat Kapota. Keterlibatan kepala adat dan kepala desa ditakutkan akan menghalangi pengembangan pariwisata yang mereka rencanakan karena pengelolaan objek pariwisata

menyangkut hak milik adat dan masyarakat lokal.

Kemungkinan ketiga adalah Taman Nasional dan Dinas Pariwisata sengaja memberikan peran yang sangat penting kepada tokoh lokal sebagai representasi Kapota sehingga beliau memiliki 'kekuasaan' penuh yang dilindungi oleh kedua instansi ini. Oleh sebab itu, ketua adat dan kepala desa tidak berani mengganggu otoritas beliau sebagai orang kepercayaan dua instansi besar di Wakatobi.

Konflik yang terjadi pada tiga tingkatan tersebut kelihatannya sangat menguntungkan tokoh representasi. Beliau berdiri pada dua kepentingan besar sehingga beliau memiliki legitimasi yang begitu kuat di Kapota. Beliaulah yang seakan-akan menentukan nasib pariwisata di Pulau Kapota sehingga beliau berhak untuk mendapatkan berbagai keuntungan dan fasilitas dari posisinya. Akan tetapi, dengan melihat konflik kepentingan yang begitu alot, kita juga bisa memosisikan tokoh representasi ini sebagai korban dari kedua kepentingan instansi besar ini. Beliau diposisikan paling depan untuk menahan gejolak lokal akibat pengembangan pariwisata yang nyatanya belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Konflik yang alot dari kedua instansi negara ini menggambarkan persaingan yang begitu sengit diantara dua kubu karena mereka melihat Kapota sebagai berlian yang belum diasah keindahannya dan akan memberikan keuntungan yang sangat besar jika mereka berhasil mengelolanya. Selain itu, konflik kedua instansi ini juga bisa dilihat sebagai perebutan ego. Taman Nasional merasa

menjadi penguasa sejak awal dan merasa terganggu dengan kehadiran Dinas Pariwisata kemudian yang mengganggu kepentingannya. Begitu juga dengan Dinas Pariwisata yang merasa bahwa wilayah pariwisata adalah bagian dari tugas mereka dan tidak suka jika wilayah kerjanya diserobot oleh pihak lain.

Konflik kepentingan inilah yang sebenarnya mengganggu desain pariwisata yang akan diterapkan di Pulau Kapota. Pariwisata yang dianggap mampu untuk mensejahterakan masyarakat, telah berubah menjadi arena politik di mana setiap orang ingin memperebutkannya. Tujuan baik membangun pariwisata di pulau Kapota pun gagal diwujudkan.

Referensi

¹Suardana, I Wayan. 2011. "Dekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan di Bali". *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 11, No 1.

²Nasrun. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari di Pulau kapota Taman Nasional Wakatobi". *Tesis*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

³Setyadi, Anung Ign, dkk. 2012. "Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah". *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol 9 No 1.

⁴*Ibid*

⁵Kecamatan baru yang terbentuk tahun 2014, sebelumnya Kapota berada di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

⁶Wakatobi memiliki 750 spesies laut dari 850 spesies yang ada di dunia

⁷Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko

⁸Satu sudah jadi, satu lagi dalam proses pembuatan

⁹Pengelolaan pariwisata dan riset di Hoga dipegang oleh pihak asing sehingga masyarakat lokal seperti terasingkan di tempat kelahiran mereka sendiri

¹⁰ Ketua adat Kapota

¹¹SPKP adalah singkatan dari Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan. Kata Banakawa diambil dari bahasa Kerajaan Buton yang berarti pertama tiba karena SPKP Banakawa adalah organisasi pertama di Pulau Kapota.

Bailey, F.G. 1970. *Stratagems and Spoils : A Social Anthropology of Politics*. Oxford: Basil Blackwell.

Giddens, Anthony. 1986. *The Contitution of Society*. London: Polity Press.

<http://infokapota.blogspot.co.id/2014/06/potensi-wisata.html>

Nasrun. 2016. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari di Pulau kapota Taman Nasional Wakatobi". *Tesis*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Setyadi, Anung Ign, dkk. 2012. "Strategi Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah". *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, Vol 9 No 1.

Suardana, I Wayan. 2011. "Dekonstruksi Kebijakan Pembangunan Pariwisata yang Berkelanjutan di Bali". *Jurnal Analisis Pariwisata*, Vol. 11, No 1.

Twikromo. 2010. *The Politics of Local Elite: Manipulating Links between the State and the Local Community in Eastern Indonesia*. Saarbücken: Lambert Academic Publishing.

Vischer. Michael P. 2009. "Contestation: Dynamics of Precedence in an Eastern Indonesian Domain." Dalam Michael P. Vischer (editor), *Precedence: Social Differentiation in the Austronesian World*. Canberra : ANU E Press. Halaman 245-274.